KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Pansus dinilai benturkan penegak hukum dan KPK
Tanggal : Sabtu, 15 Juli 2017
Surat Kabar : Republika
Halaman : 3

Pansus Dinilai Benturkan Penegak Hukum dan KPK

● DADANG KURNIA,
SINGGIH WIRYONO

PP Muhammadiyah serahkan petisi tolak pansus.

JAKARTA -- Pengamat hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai, langkah yang diambil Pansus Hak Angket KPK dengan mengunjungi kepolisian dan kejaksaan sangat tidak relevan jika tujuannya untuk memperbaiki KPK. Karena itu, menurutnya, kunjungan tersebut seolah ingin membenturkan para penegak hukum lain dengan KPK.

"Pelibatan kepolisian dan kejaksaan tidak relevan, jika ingin memperbaiki KPK. Tetapi (kunjungan Pansus Angket KPK ke kepolisian dan kejaksaan) seolah-olah dengan sengaja sepertinya membenturkan para penegak hukum lain dengan KPK," kata Fickar saat dihubungi *Republika*, Jumat (14/7).

Fickar melanjutkan, sejak awal anggota DPR yang tergabung dalam Pansus Angket KPK disinyalir ingin melemahkan KPK, bahkan membubarkannya. Sebab, jika hanya ingin mengoreksi kesalahan-kesalahan teknis pada KPK, seharusnya tidak mesti melalui angket.

"Penggunaan hak angket walaupun tidak pas dan tidak sah merupakan indikasi kuat pelemahan KPK. Karena jika hanya ingin mengoreksi kesalahan-kesalahan teknis, seharusnya cukup dengan mekanisme-mekanisme yang ada, seperti dengar pendapat, rapat kerja, dan lain-lain," ujarnya menerangkan.

Seperti diketahui, dalam dua hari terakhir, Pansus Hak Angket KPK secara berturut-turut melanjutkan safarinya dengan mengunjungi Mabes Polri dan Kejaksaan Agung. Kunjungan Pansus Angket KPK ke Mabes Polri dimaksudkan untuk meminta perlindungan karena dikhawatirkan ada mobilisasi massa yang menghambat kinerjanya.

Sementara, kunjungan ke markas Jaksa Agung HM Prasetyo dimaksudkan untuk mengoordinasikan tugas-tugas Pansus Hak Angket KPK yang terkait dengan berbagai aturan dan prosedur fungsi penuntutan dan politik penindakan tindak pidana korupsi. Pansus kemudian langsung mendapat dukungan penuh dari sang jaksa agung dalam menjalankan tugasnya.

Sebelumnya, KPK juga merasa ada yang berniat menciptakan 'cicak vs buaya' jilid baru. Hal itu menanggapi Pansus Hak Angket KPK yang menyampaikan sejumlah masalah yang mereka temukan. "Dan, pansus angket ini kelihatan ada ingin diadu-adu lagi *nih* KPK dan polisi," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, Rabu (12/7).

Syarif tak bisa bicara banyak soal niatan adu domba KPK dengan Polri. Namun, dia juga sempat mendengar komentar Dewan yang menyebut KPK tak takut dengan Presiden Joko Widodo. "Bahkan, dari komentar yang muncul, seperti mau diadu dengan Presiden," kata dia.

Menurut dia, KPK dan Polri memiliki hubungan yang harmonis. Koordinasi, supervisi, hingga penanganan kasus kolaborasi dua lembaga penegak hukum ini terus dilakukan.

Petisi

Sementara, Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah menyerahkan petisi penolakan Hak Angket KPK. Petisi daring yang digalang di situs *Change.org* dengan jumlah tanda tangan petisi 45.111 langsung diserahkan oleh Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Suryanto, kepada Ketua Pansus Hak Angket KPK, Agun Gunandjar.

Suryanto mengatakan, petisi tersebut merupakan hasil yang digalang atas keputusan DPR yang membentuk Pansus Hak Angket KPK dengan cara-cara yang janggal. Menurut Suryanto, Hak Angket KPK merupakan suatu upaya untuk menghalang-halangi kinerja KPK atas kasus mega-korupsi KTP-el yang sedang ditangani KPK yang melibatkan nama-nama anggota DPR.

Ketua Panitia Khusus Hak Angket Agun Gunandjar mengatakan, sadar atau tidak, pendukung KPK dan KPK sedang membajak hak-hak dari Panitia Khusus Hak Angket. Agun mengatakan, hal tersebut terbukti karena mengalihkan dan memindahkan permasalahan yang menjadi domain pansus menjadi di luar dari mekanisme formal.

■ **ed:** muhammad hafil